

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Good governance adalah suatu proses yang dijalankan di dalam suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan indikator sosial dan ekonomi dalam suatu bidang usaha, dengan harapan mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, prinsip transparansi harus diperhatikan sebagai tanggung jawab penuh pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan keterbukaan dalam segala hal terkait informasi pembangunan desa.¹ Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang efektif, prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi sangat penting. Salah satu dari prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip transparansi.

Penerapan transparansi memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui transparansi, dapat diatasi kemungkinan munculnya monopoli kekuasaan dalam pengambilan kebijakan, serta mengurangi tingkat penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, usaha untuk menciptakan transparansi tidak hanya memberikan informasi keuangan desa

¹ Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan, "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)," *JURNAL EKSEKUTIF* 1, no. 1 (19 Juni 2017): hal. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/16325>.

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka.²

Pada zaman yang modern ini, perkembangan teknologi semakin pesat di seluruh dunia. Saat ini, segala aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Percepatan modernisasi tidak dapat dihentikan, dan penggunaan teknologi menjadi tak terhindarkan dalam berbagai hal, baik yang berskala kecil maupun besar. Pendorong utama dari kemajuan teknologi ini adalah proses digitalisasi. Digitalisasi merujuk pada transformasi dari teknologi analog ke teknologi digital. Langkah digitalisasi ini diambil dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di seluruh sektor, khususnya dalam kerangka Industri 4.0. Dengan demikian, waktu dan semua sumber daya yang tersedia dapat dioptimalkan secara maksimal untuk mencapai keuntungan yang optimal.

Teknologi informasi merupakan hasil dari kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Saat ini, kemajuan teknologi informasi terjadi dengan cepat, dan salah satu faktor utama yang memicu perkembangan tersebut adalah adanya komputer dan internet. Kerjasama antara komputer dan internet telah menciptakan sumber informasi dan pengetahuan yang tak terbatas. Dengan menggunakan komputer dan internet, setiap orang dapat dengan mudah mengakses

² Erna Hendrawati dan Mira Pramudianti, "PARTISIPASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA DESA," *JRAK* 12, no. 2 (28 Oktober 2020): hal. 112, <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>.

informasi terkini, meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, dan juga mengelola serta memproses data dalam jumlah besar dengan lebih mudah.³

Mengoptimalkan efektivitas digitalisasi dapat dilakukan dengan menyebarkan berbagai informasi positif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait pelayanan haji. Pemanfaatan digitalisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan segala bentuk informasi terkait ibadah haji. Selain itu, teknologi ini juga dapat berperan sebagai langkah untuk menjaga keamanan dengan mencatat atau menyimpan data secara aman.

Pasal 29 Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui prinsip kebebasan beragama dan beribadah. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan, "Negara menjamin kebebasan setiap penduduknya untuk mengamalkan agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya." Prinsip ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya dan melaksanakan ibadahnya. Salah satu contoh konkret dari jaminan tersebut adalah dukungan pemerintah terhadap kebebasan beribadah, terutama dalam pelaksanaan ibadah haji.

³ Galuh Dwi Ardiana dan Siti Fatimah, "Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pendaftaran Haji Khusus Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019," *Jurnal Manajemen Dakwah* 7, no. 1 (7 Agustus 2021): 29–55, <https://doi.org/10.14421/jmd.2021.71-02>.

Pelaksanaan ibadah haji merupakan tanggung jawab nasional yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Kewajiban negara dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015. Peraturan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022, yang merujuk pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Sebelumnya, ketentuan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2009 yang mengubah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan, bimbingan, dan perlindungan kepada jemaah haji agar mereka dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama, dan mencapai kemandirian dalam penyelenggaraan ibadah haji.⁴

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang memiliki makna spiritual yang sangat besar dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memenuhi syarat fisik dan finansial untuk menjalankannya. Landasan hukum pelaksanaan ibadah haji ini terdapat dalam Alquran, yakni Surat Ali 'Imran (3:97), yang menyatakan sebagai berikut:

⁴ “UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji [JDIH BPK RI],” diakses 27 Maret 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39044/uu-no-13-tahun-2008>.

حَجُّ النَّاسِ عَلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ آمِنًا كَانَ دَخَلَهُ وَمَنْ هَٰ إِبْرَاهِيمَ مَقَامٌ بَيَّنَّتْ آيَةٌ فِيهِ
أَلْعَلِّمِينَ عَنِ اللَّهِ فَإِنَّ كَفَرَ وَمَنْ سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk (ibadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah), tempat yang penuh berkat dan petunjuk bagi semua alam"

Selain ayat Al-Quran di atas, haji juga disyariatkan lewat hadits yang menjelaskan lima rukun Islam.

وَالْحَجَّ : مِنْهَا ... خَمْسٌ عَلَى الْإِسْلَامِ بُنِيَ

'Islam itu ditegakkan di atas lima perkara... haji'. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan ibadah haji. Salah satu terobosan terbaru dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan ibadah haji adalah diperkenalkannya Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) oleh Kementerian Agama. SISKOHAT, sebagai bagian dari usaha peningkatan kualitas layanan kepada jemaah haji, adalah suatu sistem komputer yang didesain khusus untuk mengatur dan memantau seluruh tahapan perjalanan haji, mulai dari pendaftaran calon jemaah haji hingga kepulangan mereka setelah menyelesaikan ibadah haji. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan registrasi, manajemen data, dan distribusi informasi secara lebih efisien. Kemunculan SISKOHAT menandai langkah signifikan dalam modernisasi penyelenggaraan haji, yang tidak hanya bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi administratif tetapi juga untuk memastikan bahwa jamaah haji menerima informasi secara transparan dan tepat waktu.

Transparansi informasi melibatkan penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses tentang berbagai aspek ibadah haji, termasuk prosedur pendaftaran, kuota haji, biaya, dan rencana perjalanan. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi tersebut, Kementerian Agama tidak hanya memenuhi hak-hak jamaah haji, tetapi juga memberikan rasa aman, keyakinan, dan kenyamanan selama menjalankan ibadah haji. Informasi yang diberikan secara tepat waktu dan akurat membantu jamaah haji menghindari kebingungan dan potensi penyalahgunaan. Selain memberikan manfaat langsung kepada jamaah haji, keterbukaan informasi melalui SISKOHAT menjadi penting untuk pengawasan dan akuntabilitas.

Sebagai salah satu wilayah di Indonesia, Kabupaten Kediri memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama Kabupaten Kediri berfungsi sebagai lembaga penyelenggara ibadah haji tingkat daerah. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung ibadah haji, Kementerian Agama Kabupaten Kediri bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah dengan menerapkan SISKOHAT. Di era modern yang didukung teknologi, pemanfaatan SISKOHAT dinilai sebagai sebuah langkah maju untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji. Dengan mengadopsi teknologi ini, diharapkan proses administratif dapat dipercepat,

kesalahan dapat diminimalkan, dan informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh seluruh jamaah haji.

Penerapan SISKOHAT di Kementerian Agama Kabupaten Kediri menjadi solusi untuk memudahkan pemahaman informasi serta transparansi informasi terkait pelaksanaan ibadah haji. Melalui pemanfaatan sistem komputer ini diharapkan seluruh informasi terkait pendaftaran, persyaratan, jadwal keberangkatan, akomodasi di Makkah dan Madinah, serta berbagai informasi penting lainnya terkait haji dapat dengan mudah diakses oleh jamaah haji dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain untuk lebih memahami proses pelaksanaan haji, pentingnya transparansi dalam hal ini dipahami sebagai faktor kunci untuk membangun kepercayaan dan menjamin keakuratan informasi. Meskipun SISKOHAT telah diterapkan, pertanyaan mengenai sejauh mana keberhasilan sistem ini dalam menyediakan informasi yang transparan perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya transparansi dalam memberikan informasi kepada jamaah haji melalui teknologi yaitu melalui penerapan SISKOHAT yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan sejauh mana keberhasilan sistem ini dalam memberikan informasi yang transparan kepada jamaah haji. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan memilih judul **“TRANSPARANSI INFORMASI KEPADA JAMAAH HAJI MELALUI**

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan SISKOHAT dalam memberikan keterbukaan informasi kepada jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana peran SISKOHAT dalam memberikan keterbukaan informasi kepada jamaah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri ?
3. Apa saja kendala pada saat penerapan SISKOHAT dalam memberikan keterbukaan informasi kepada jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan SISKOHAT dalam memberikan keterbukaan informasi kepada jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui peran SISKOHAT dalam memberikan keterbukaan informasi informasi kepada jamaah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
3. Untuk mengetahui kendala pada saat penerapan SISKOHAT dalam memberikan keterbukaan informasi kepada jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk memperluas pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, berkontribusi pada literatur pengembangan manajemen secara umum, dan meningkatkan pemahaman akademis mengenai pelayanan haji dengan memanfaatkan Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri

2. Secara Praktis

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, masukan untuk memperbaiki SISKOHAT lebih baik serta untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang efektif dan efisien pada suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memiliki tujuan untuk mengumpulkan materi perbandingan dan sebagai panduan, dengan maksud untuk menghindari kesan bahwa penelitian ini serupa. Oleh karena itu, dalam studi ini, peneliti mencatat temuan dari penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Mutmainnah (2011)

Penelitian ini berjudul *“Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kementerian Agama RI”*.

Penelitian ini membahas tentang penerapan SISKOHAT dalam penyelenggaraan ibadah haji, mekanisme pelaksanaan, serta faktor pendukung dan penghambat SISKOHAT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.⁵

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Siskohat adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang mengatur seluruh aspek perjalanan haji di Indonesia. Aplikasi ini mencakup pendaftaran, dokumentasi haji, keuangan BPIH, sistem kesehatan haji, dan data petugas haji. Dengan penerapan Siskohat, pelayanan haji termasuk pengendalian pendaftaran, kuota haji nasional, penentuan keberangkatan haji, dan nomor porsi haji dapat dilakukan dengan baik untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan ibadah haji.

2. Hasil Penelitian Herni Yuliani, Ahmad Sarbini, dan Herman (2016)

Penelitian ini berjudul *“Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Transparansi Informasi kepada Calon Jamaah Haji di kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.”*. Penelitian ini membahas tentang peran, fungsi, program dan sosialisasi yang dilakukan

⁵ Mutmainnah, “Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia” (Skripsi, Jakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

siskohat dalam memberikan transparansi informasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran utama Siskohat adalah sebagai penyedia informasi yang relevan sesuai kebutuhan jemaah haji. Penerapan Siskohat melalui program-program nya menciptakan transparansi yang menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat terutama jemaah haji.

3. Hasil Penelitian Galuh Dwi Ardiana, Siti Fatimah (2019)

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Pendaftaran Haji Khusus Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*”. Penelitian ini membahas tentang penerapan SSKOHAT dalam pendaftaran haji khusus. Penelitian ini di motivasi oleh kesulitan mencari informasi tentang waktu tunggu keberamngkatan haji melalui SSKOHAT, yang merupakan tantangan bagi Kantor Wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.⁷

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa SSKOHAT telah berhasil diterapkan dengan menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone

⁶ Herni Yuliani, Ahmad Sarbini, dan Herman, “Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Transparansi Informasi Kepada Calon Jemaah Haji,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (30 Juni 2016): 102–20, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i2.130>.

⁷ Ardiana dan Fatimah, “Implementasi Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pendaftaran Haji Khusus Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.”

dan McLean. Lima aspek yang dinilai dalam model ini adalah kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan dan kepuasan pengguna. Penelitian ini juga mencatat salah satu pengukuran yaitu manfaat-manfaat bersih yang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi 3 faktor pendukung keberhasilan dan 2 faktor penghambat dalam penerapan SISKOHAT.

4. Hasil Penelitian Rini Yulianti (2023)

Penelitian ini berjudul *“Implementasi Kebijakan Program Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana program SISKOHAT diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan program SISKOHAT dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.⁸

Hasil penelitian ini adalah penerapan program SISKOHAT dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut mencakup kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP)

⁸ Rini Yulianti, “Implementasi Kebijakan Program Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru” (Skripsi, Riau: Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023).

terkait SISKOHAT, keterbatasan kompetensi staf dalam mengoperasikan sistem, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta masalah jaringan yang mempengaruhi efisiensi waktu.

5. Hasil Penelitian Nadia Arimbi Saraswati (2021)

Penelitian ini berjudul “*Analisis Penerapan E-Government Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Pelayanan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar*”. Penelitian ini membahas tentang sejauh mana keberhasilan penerapan e-Government melalui SISKOHAT dalam penyelenggaraan haji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif.⁹

Hasil penelitian ini membahas tentang penerapan e-Government melalui aplikasi SISKOHAT dengan fokus pada elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilannya. Elemen-elemen tersebut termasuk Support (dukungan hukum), Capacity (sumber daya finansial dan manusia), dan Value (kemudahan dalam penggunaan sistem). Dalam penelitian ini juga mencatat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti keterbatasan ruangan dan metode sosialisasi kepada jamaah haji yang datang langsung ke kantor.

6. Hasil Penelitian Putri Auliyaa, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan (2021)

⁹ Nadia Arimbi Saraswati, “Analisis Penerapan E-Government Melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pelayanan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar” (Skripsi, Makassar: Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2021).

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Ogan Lopian*”. Penelitian ini membahas tentang analisis pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi atau elektronik di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi telah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan dalam konteks ini, sektor publik terus mengembangkan berbagai model layanan untuk memudahkan akses.

7. Hasil Penelitian Sofany Russo Rumimpunu, Johny R. E. Tampi, Very Y. Londa (2021)

Penelitian ini berjudul “*Penerapan E-Government dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kota Manado)*”. Penelitian ini membahas tentang penerapan e-government yang bertujuan untuk mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik di Kota Manado. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.¹¹

¹⁰ Putri Auliyaa, Rahmat Hidayat, dan Rudyk Nababan, “Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian,” *KINERJA* 18, no. 4 (20 November 2021): 502–12, <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9804>.

¹¹ Sofany Russo Rumimpunu, Johny R. E. Tampi, dan Very Y. Londa, “Peranan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung),” *AGRI-SOSIOEKONOMI* 17, no. 2 MDK (30 Juli 2021): 691–702, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2>.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Mutmainnah, 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan • SISKOHAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini hanya berfokus pada peran SISKOHAT dalam mengatur pendaftaran, dokumentasi, keuangan, kesehatan, dan data petugas haji. Penelitian ini mengeksplorasi dampak penerapan SISKOHAT terhadap pengendalian pendaftaran, alokasi kuota haji, penentuan keberangkatan, dan nomor porsi haji untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji. • Lokasi yang diteliti juga berbeda
2.	Jurnal, Herni Yuliani, Ahmad Sarbini, dan Herman, 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi informasi • SISKOHAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada calon jamaah haji dan membahas tentang sosialisasi yang dilakukan melalui Bimbingan Manasik di berbagai KUA dan Kemenag Kab/Kota kepada jamaah haji, yang mencakup informasi tentang perjalanan dan teknis ibadah haji dari tanah air ke Arab Saudi dan kembali ke tanah air.

			<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang diteliti juga berbeda
3.	Jurnal, Galuh Dwi Ardiana dan Siti Fatimah, 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan • SISKOHAT • Haji khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan SISKOHAT dalam pendaftaran haji khusus. • Lokasi yang diteliti juga berbeda
4.	Skripsi, Rini Yulianti, 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan • SISKOHAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini hanya berfokus membahas tentang penerapan SISKOHAT. • Lokasi yang diteliti juga berbeda
5.	Skripsi, Nadia Arimbi Saraswati, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan • SISKOHAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas penerapan e-Government melalui SISKOHAT dengan fokus pada elemen-elemen pendukung kesuksesannya dan mencatat kendala seperti keterbatasan ruangan dan metode sosialisasi kepada jamaah haji yang datang langsung ke kantor. • Lokasi yang diteliti juga berbeda
6.	Jurnal, Putri Auliyaa, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi teknologi dalam konteks layanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi dalam konteks yang lebih umum yang berfokus pada 'Ogan Lopian' • Lokasi yang diteliti juga berbeda
7.	Jurnal, Sofany Russo Rumimpunu, Johny R.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada Transparansi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup dan konteks • Objek penelitian • Tujuan

	E. Tampi, Very Y. Londa, 2021	Keterbukaan : bagaimana teknologi atau sistem informasi digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi atau sistem informasi dalam upaya meningkatkan transparansi 	
--	-------------------------------	--	--

F. Definisi Konsep

Untuk menghindari penafsiran yang salah dan mempersempit fokus penelitian mengenai transparansi informasi kepada jamaah haji melalui penggunaan SISKOHAT di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, maka akan dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Transparansi Informasi

Transparansi informasi merujuk pada sejauh mana data dan informasi terkait proses atau aktivitas pemerintah atau institusi dapat diakses dan dilihat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun melalui teknologi. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan dapat dipahami secara

terbuka dan tidak tersembunyi. Serta membangun tingkat kepercayaan dan pemahaman yang memadai di antara masyarakat atau pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah sejauh mana SISKOHAT memberikan akses informasi kepada jamaah haji.

2. SISKOHAT

Siskohat merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengurus seluruh aspek perjalanan haji di Indonesia. Sistem ini meliputi registrasi jamaah haji, pengelolaan dokumen haji, pencatatan keuangan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), basis data transportasi haji, penempatan pemondokan jamaah, informasi publik, sistem informasi kesehatan hajim dan database petugas haji. Dengan menerapkan siskohat, semua layanan terkait ibadah haji seperti pengendalian pendaftaran, penyeteroran data BPIH, pengaturan kuota haji nasional, penentuan jadwal keberangkatan haji, dan penentuan nomor posi haji dapat dilaksanakan secara efisien untuk memberikan kenyamanan, kelancaran, dan kecepatan dalam pelaksanaan ibadah haji.